

## **Konsep Sufistik “Martabat Tujuh” Sebagai Model Islamisasi Masyarakat Buton**

**Rifatul Khoiriah Malik**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

*rifah.writer@gmail.com*

### **Abstract**

The article aims to examine the traces of the spread of Islam in Buton in terms of an analysis of the process of islamization in the archipelago. One of the processes of Islamization in Buton is related to the concept of "Martabat Tujuh." The concept of "Martabat Tujuh" which is considered to be the teachings of Sufism is a forerunner to the system of the Sultanate of Buton in the past. 138-1584) Sultan Murhum is called the title of the Sultanate of Qa'im ad-din, historical approach method is part of the achievement of the results of this research. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis especially in order to describe the contextualization of the concept of "Martabat Tujuh" with The purpose of this research is to review the history of Islam that developed in Buton as one of the processes of Islamization in the archipelago. The results of this study indicate that a critical review of Islamic civilization in the past needs to be an example so that Islam in the modern era still exists especially as an alternative settlement problem of society.

Keywords: Historical Trails, Islam Buton, Martabat Tujuh, Tasawuf

## Abstrak

Artikel bertujuan untuk mengkaji jejak penyebaran Islam di Buton ditinjau dari analisis proses islamisasi di Nusantara. Salah satu proses Islamisasi di Buton berkaitan dengan konsep "Martabat Tujuh". Konsep Martabat tujuh yang dianggap merupakan ajaran tasawuf merupakan cikal bakal sistem Kesultanan Buton pada masa silam. Sistem kesultanan menjadi sistem pemerintahan di Buton terjadi di masa Sultan Qa'im ad-din (138-1584). Sultan Murhum menjadi sebutan gelar kesultanan Qa'im ad-din. Metode pendekatan historis menjadi bagian dari pencapaian hasil penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif terutama dalam rangka menjabarkan kontekstualisasi konsep "martabat tujuh" dengan masa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kembali sejarah Islam yang berkembang di Buton sebagaimana salah satu proses islamisasi di Nusantara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meninjau kembali secara kritis terhadap peradaban Islam pada masa lampau perlu menjadi contoh agar Islam di era modern tetap eksis terutama sebagai alternatif penyelesaian masalah masyarakat.

Kata Kunci: Islam Buton, Jejak Sejarah, Martabat Tujuh, Tasawuf

## Pendahuluan

Sejarah masuknya Islam di Indonesia selain melalui jalur pernikahan atau perdagangan, juga diketahui melalui jalur ajaran tasawuf. Di kerajaan Buton, Islam diterima pada tahun 948 H, atau 1540 M (Yunus, 2015, hal. 1). Kerajaan Buton merupakan salah satu di antara sejumlah kerajaan di Nusantara yang menerapkan ajaran tasawuf yaitu "martabat tujuh" dalam sistem pemerintahannya (Purwanto, 2017, hal. 2). Pulau Buton terletak di wilayah Indonesia bagian timur (Sulawesi Tenggara), letaknya sangat strategis diposisikan antara kota pelabuhan Makassar dan pulau rempah-rempah Indonesia Maluku. Pulau-pulau yang terletak di lepas pantai dianggap penting sebagai perdagangan maritim Asia Tenggara. Akibatnya, menjadi bagian dari perebutan kekuasaan yang berkelanjutan. Sampai pada tahun 1960-an, Buton juga merupakan pusat Kerajaan Wolio, ibukotanya adalah Bau Bau, sebagai pusat pemerintahan Sultan atas pulau-pulau Muna, Kabaena, Kepulauan Tukang Besi, dan sekitarnya (Brenner, 2014, hal. 110).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jejak penyebaran Islam di Buton melalui ajaran tasawuf. Di antara jejak yang hingga kini bisa disaksikan tentang keberadaan kesultanan Buton adalah Mesjid Keraton Wolio, Gelar "Sultan" untuk raja-raja, istilah keislaman yang banyak terdapat dalam undang-undang kerajaan, naskah-naskah ajaran agama Islam yang ditulis oleh para tokoh agama, undang-undang

kerajaan yang berisikan ajaran “Martabat Tujuh”, dan terdapat semboyan kerajaan yang berbunyi (Purwanto, 2017),

*Anadaki anadakimo arataa solana boli okaro;*

*Anadaki anadakimo karo solana boli olipu;*

*Anadaki anadakimo lipu solana boli osara;*

*Anadaki anadakimo sara solana agama.*

*Artinya:*

*“Biarkan harta hancur, asalkan keselamatan diri. Biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri. Biarkan negeri hancur asalkan keselamatan pemerintah. Biarkan keselamatan pemerintah hancur asalkan keselamatan agama.”*

Agama pada penggalan semboyan kerajaan tersebut merujuk pada agama Islam yang terilhami oleh konsep martabat tujuh dari ajaran tasawuf. Selain dianggap sebagai pandangan hidup masyarakat Buton, martabat tujuh juga menjadi undang-undang kerajaan yang hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Buton. Isi dari undang-undang tersebut merupakan aplikasi dari konsep sufistik yang membahas tujuh tingkatan gradasi wujud. Konsep sufistik martabat tujuh sebagai hasil pengembangan konsep sufistik Ibn Arabi dan Al-Jili yang dilakukan Syekh Fadl Allah al-Burhanpuri (1020 H/1620 M) (Abdillah, 2010, hal. 101). Melalui hasil beberapa sumber dikatakan bahwa kerajaan Buton masih kental dengan ajaran tasawuf. Namun tasawuf pada masa kesultanan hanya dipelajari oleh golongan atas.

Dari beberapa ulasan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah; Bagaimana gambaran jejak penyebaran Islam di Buton? Bagaimana konsep sufistik “Martabat Tujuh” diaplikasikan dalam Kesultanan Buton? Melalui rumusan masalah ini, diharapkan akan menjawab beberapa problema yang terjadi di masyarakat Buton hingga saat ini. Selain itu, penulis akan menjabarkan mengenai kontekstualisasi martabat tujuh di era modern.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dimulai dari pengumpulan data yang diawali dengan penelusuran data pustaka. Menggunakan kajian analisis deskriptif dengan memaparkan beberapa jejak sejarah Buton saat ini dengan menggunakan teknik survei dan analisis dokumenter (Suryana, 2010, hal. 20). Selanjutnya hasil penelitian ini

ditinjau dengan kajian historis yang mana Tasawuf ialah sebagai salah satu ajaran yang dipelajari warga Buton pada masa Kesultanan Pertama. Penulisan ini bertujuan untuk membuat masyarakat menyadari apa yang terjadi di masa Kesultanan Buton hingga menjadikannya pelajaran di masa kini. Melihat sisi kegagalan dan keberhasilan di masa lampau, ialah pelajaran utama untuk mengaplikasikan ajaran Islam di era millennial.

## Kajian Teori

### *Martabat Tujuh dalam Ajaran Tasawuf*

Martabat Tujuh merupakan ajaran yang dikenal dalam ilmu tasawuf yang berkembang di Nusantara pada awal abad ke 17 M. dibawa oleh Syekh Syamsuddin al-Sumatrani (1630 M) sebagai penganjur pertama, pendapat ini didukung oleh Abdul Hadi WM. Berbeda dengan pendapat A.H Jhons ia seorang Profesor dalam kajian literatur dan Bahasa Indonesia di Australian National University. Ia telah menerjemahkan kitab *Tuhfat al-Mursalat* (Sangidu, 2002, hal. 7–8) dalam bahasa Inggris dengan judul. “*The Gift Adressed To The Spirit Of The Prophet.*” Dalam buku tersebut A.H Jhons menjelaskan martabat tujuh masuk ke Nusantara, menurutnya martabat masuk Nusantara diperkirakan pada tahun 1590 M, yaitu ketika kitab *Tuhfah al-Mursalat* dikirim dari India ke Aceh. Pendapat Abdul Hadi WM tersebut disadarkan ketika Syekh Syamsuddin mengajarkan martabat tujuh di Aceh memasuki abad 17 M. Sedangkan pendapat Jhons didasarkan pada bukti pengiriman kitab *Tuhfah al-Mursalat* ke Aceh pada penghujung abad 16 (Abdillah, 2010).

Adapun tokoh-tokoh pengembang martabat tujuh di Nusantara adalah Syekh Syams al-Din al-Sumatrani (1630 M) di Sumatera. Syekh Abd al-Rauf al-Sinkili (1024-1105/1615-1693) di Aceh, Sultan Dayyan Ihsan al-Din (1578-1616 M) di Buton. Syekh Abdul Muhyi (1650-1730 M) di Pamijanah, Jawa Barat. Kyai Kesan Besari Pengasuh Pesantren di Tegalsari, Ponorogo. Raggawarsita (1802-1873 M) di Solo, Jawa Tengah. Haji Hasan Mustafa (1852-1930 M) di Cikajang, Garut, Jawa Barat. Abdullah bin Abdul Qahhar al-Bantani (Abad 18 M) di Banten. Syekh Abd al-Shamad al-Palimbani (1704-1789 M) di Palembang. Syekh Nafid al-Banjari (1148/1735) di Kalimantan dan terakhir Kyai Muhammad Santri (1929 M) di Gunung Salak, Jawa Barat (Abdillah, 2010).

## Hasil

### *Sejarah Islam Buton*

Sebelum Islam masuk di Buton. Buton dikenal dengan Kerajaan Buton yang menganut pemerintahan sistem Monarki. Wa Kaka (Yunus, 2015) merupakan Raja pertama Kerajaan Buton yang berkuasa secara turun temurun. Pada masa kerajaan ini dari raja pertama hingga raja ke lima tidak ditemukan tanda-tanda pengaruh Islam bahkan yang tampak adalah pengaruh kebudayaan Hindu yang salah satunya terdapat pada nama-nama Raja. Nama Sibarata, suami Wa Kaka berasal dari kata “*Bhattara*”, bahasa Sanskerta.

Islam diterima sebagai agama kerajaan Buton pada masa pemerintahan raja keenam yaitu Lakilaponto, pada tahun 948 H/1540 M. Setelah memeluk Islam Lakilaponto dilantik menjadi Sultan dengan gelar *Qa'im ad-din* (138-1584) yang ketika beliau dilantik menjadi Sultan lebih dikenal dengan nama *Murhum*. Menurut riwayatnya bahwa pada masa Raja Buton Lakilaponto, Syekh Abd Wahid datang bersama istrinya Waode Solo dan anaknya, Ledi Penghulu, ia dianggap orang keramat turunan Sayyid Mekah, cucu Nabi Muhammad. Atas ajakannya, maka Raja Lakilaponto bersama menteri-menterinya memeluk Islam yaitu pada hari senin, 1 Ramadhan 948 H Lakilaponto dilantik menjadi Sultan oleh Syekh dengan nama kehormatan *Qa'im ad-din al-Khalifah al-Khamis* (Zahari, 1977, hal. 10).

Sebagai mata rantai proses islamisasi di Nusantara semenjak abad ke 13, Buton baru menerima Islam pada pertengahan abad ke 16. Menurut sumber setempat, rajanya yang ke-enam adalah raja pertama yang menerima Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 948 H atau 1540 M. penduduk setempat mengislamkannya dengan memberi gelar “Sultan”. Dengan demikian penulis-penulis lokal setempat senantiasa menyebut bekas kerajaan ini dengan “Kesultanan Buton”

Gelar “Sultan” merupakan nama penghormatan yang “kearaban”, sebagaimana digunakan oleh Kesultanan Buton pertama Lakilaponto. Hal itu merupakan pengaruh kultur Islam yang juga berlaku di kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang telah menerima Islam. Sebenarnya penggunaan nama “buton” hanya lazim digunakan oleh orang luar sebagai sebutan Kesultanan Buton. Penduduk setempat lazim menggunakan sebutan “wolio” (Purwanto, 2017).

Kota Wolio atau Keraton sebagai batas pusat pemerintahan pada masa kesultanan masih memperlihatkan berbagai peninggalan sejarah yang dapat disaksikan pada masa sekarang. Peninggalan-peninggalan itu berupa benteng tua, istana para sultan dan kuburannya, masjid tua, alat-alat kelengkapan kesultanan dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan adanya suatu sistem “kekuasaan lama” yang pernah berlaku di daerah ini, sekaligus menunjukkan ciri peninggalan kota yang bertipe Islam (Yunus, 2015).

Penerimaan Islam di Buton sepanjang abad ke-16, baru memasuki tahap kategori gelombang pertama dalam konteks klasifikasi era Islamisasi. Pada era pertama tersebut merupakan tahap terbentuknya suatu komunitas pemeluk yang tidak sejalan dengan pengakuan iman yang dianut pada waktu itu dan adanya kesadaran terhadap “batas” antara dunia kini yang *haqq* dan dunia lama yang *bathil* (Abdullah, 1991, hal. 21).

Memasuki abad ke-17 pengaruh Islam semakin terlihat di masa pemerintahan Laelangi, bergelar Sultan Dayyan Ihsan ad-Din (1597-1631). Ia meletakkan undang-undang kerajaan yang disebut dengan “Martabat Tujuh” (Ilyas, 2017, hal. 130). Disebut demikian karena berisi ajaran martabat tujuh, yaitu suatu ajaran yang dikenal dalam dunia tasawuf. Dalam proses islamisasi itu, ajaran tasawuf ikut mewarnai corak keislaman di negeri ini. Pada abad ke-19, ajaran tasawuf masih memiliki posisi penting (Ni’am, 2016).

Terdapatnya sebuah naskah ajaran tasawuf dari ulama sufi terkenal sebelum abad ke-19 yang dimiliki oleh kalangan penguasa kesultanan (Rajab, 2015). Ulama-ulama sufi terkenal yang ditemukan naskah-naskah ajarannya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, ibn Arabi, Muhammad Ibn Fadlullah al-Burhanpuri, Hamzah Fansuri, Syams ad Din as Sumatrani, Nur ad Din ar Raniri, Syaikh Yusuf al-Khalwati, Muhammad ibn ‘Abdul Karim as-Sammaan al-Madani, dan ‘Abd as-Samad al-Palimbani.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap sejumlah naskah sufi populer tersebut, ditambah sejumlah naskah lain peninggalan kesultanan, menunjukkan bahwa penguasa kesultanan Buton abad ke 19 pernah menerima ajaran-ajaran tasawuf baik yang sifatnya *tarekat* maupun yang teosofis (Rajab, 2015). Ajaran tarekat yang pernah

diterima diantaranya ajaran *Qadiriyyah*, *Syattariyyah*, dan *Khalwatiyyah Sammaniyah*. Sedangkan yang sifatnya teosofis adalah doktrin “martabat tujuh” dan “*Insan Kamil*”.

Pengajaran tasawuf hanya berlaku bagi kalangan penguasa di Keraton (Nanti, Sewang, & Muzakkir, 2018). Otoritas untuk mengajarkan ajaran tasawuf hanya dimiliki oleh golongan penguasa (Yulianto, 2014). Empat dari enam sultan yang berkuasa pada abad ke-19, di samping pejabat kesultanan lainnya, dipandang sebagai ulama sufi di negerinya. Bahkan di antaranya ada yang dipandang sebagai “*syekh*” tarekat Khalwatiyyah Sammaniyah.

Ajaran-ajaran tasawuf yang berkembang pada abad ke-19 di Buton meliputi ajaran-ajaran *fana'* dan *baqa'*, zikir, khalwat, *muraqabah*, *maqamat*, dan *wahdah al-wujud* dan tokoh sufi yang mempengaruhi adalah Muhammad ibn Abd al-Karim as-Samman, Muhammad al-Ghazali, ‘Abd as-Samad al-Palimbani. Selain itu, paham teosofi Syams ad-Din as-Sumatrani dan Muhammad Fadlullah al-Burhanpuri juga masih ada pengaruhnya.

### *Jejak Sejarah Islam Buton*

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari beberapa sumber, berikut adalah jejak sejarah peninggalan Kesultanan Buton yang hingga kini masih ada dan sebagian digunakan oleh masyarakat Buton.

### *Masjid Tua Wawoangi*

Gambar 2. Masjid tua di Buton



Masjid tua ini adalah bukti masuknya Islam di tanah Buton. Masjid dengan model klasik menjadi saksi masuknya peradaban Islam di tanah Buton yang menjadi negeri *Khalifah al-Khamis* yang dikenal dengan Sultan Murhum. Bentuk bangunannya sederhana, berdinding bambu, atapnya kayu dan ukuran bangunannya kecil. Meskipun

seperti ini, masjid Wawoangi tetap berdiri kokoh dan tidak pernah dipugar sejak dibangun ratusan tahun lalu (Adilia & Said, 2019).

Konon masjid ini merupakan yang pertama berdiri sejak pertama kali Syekh Abdul Wahid membawa syi'ar Islam di tanah Buton. Masyarakat sekitar meyakini masjid ini sangat berkat (*Kabarakati Masigi Wawoangi*) dan menyimpan cerita mistis (Muzira, 2018). Perjalanan menuju desa Wawoangi Kecamatan Sampola membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Bau-Bau. Setengah jam dari ibukota Kabupaten Busel, Batauga. Masjid tua itu terletak di atas bukit di desa Wawoangi.

Lokasi masjid ini jauh dari pemukiman. Berdiri di masjid itu, akan menampakkan pemandangan seluruh desa di Sampolawa. Dari sisi kiri masjid dapat menyaksikan pemukiman warga. Pasir putih di desa tersebut menghiasi pandangan mata. Begitu pula lautan lepas laut Banda. Di bagian barat tampak jelas benteng yang hingga kini belum digarap potensi wisatanya.

Dari hasil wawancara Defrianto dengan Kepala Desa Wawoangi, La Ode Abdul Hakim, menyatakan bahwa, berdirinya masjid diperkirakan saat Syech Abdul Wahid penyebar Islam di tanah Buton pada tahun 1527 M. berdasarkan catatan Defrianto, penamaan Masjid Tua Wawoangi berdasarkan nama lokasi kampung. Wawoangi sendiri berasal dari bahasa lokal "Cia-Cia" yang artinya di atas angin, oleh sebab itu warga biasa menyebutnya masjid di atas angin.

### *Masjid Agung Keraton*

Gambar 3. Masjid agung Wolio



Dikenal dengan Masjid Agung Wolio ini terletak di tengah wilayah pusat kekuasaan Kesultanan Buton yaitu Keraton Buton (Alifuddin, 2006, hal. 13). Masjid ini merupakan peninggalan Sultan Buton ke-19, bernama Langkariri bergelar Zakiuddin Darul Alam (1712-1750 M). letak masjid pada pusat pemerintahan, mengisyaratkan

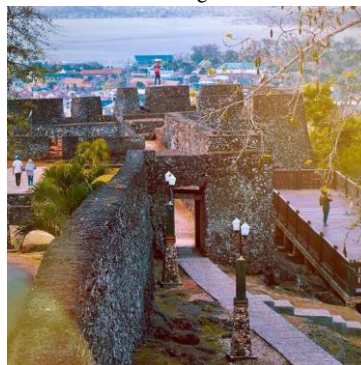


betapa Islam memiliki pengaruh besar pada pemerintahan Buton masa lalu. Masjid agung ini menyimpan beragam symbol, yang mana makna symbol tidaklah tunggal melainkan bisa berbiak menjadi banyak sebagaimana ungkapan antropolog Victor Turner (Idham, 2012).

Adapun symbol yang mencerminkan keislaman masyarakat setempat di masjid ini adalah tangga masjid berjumlah 19 mengandung arti tujuh belas rakaat shalat wajib dan dua rakaat shalat sunnah masjid (*tahiyatul masjid*). Kemudian tangga loteng berjumlah sebanyak 13 yang bermakna sifat 13 pada Tuhan dari rukun 13. Tiang masjid (sokoguru) berjumlah 20 adalah sifat Tuhan yang ke-20. Jendela loteng berjumlah 12 melambangkan lubang pada manusia. Demikian pula dengan jendela badan masjid 12. Gendang melambangkan hati manusia. Mihrab melambangkan *arsy* atau singgasana Allah. Empat tangga mimbar melambangkan lambang empat khalifah (Darmawan, 2008, hal 17-18).

### *Benteng Keraton Buton*

Gambar 4. Benteng Keraton Buton



Benteng keraton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini terbuat dari batu kapur/apung. Benteng yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling 2.740 m. Benteng ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Guinness Book Record yang dikeluarkan bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar (Susanti, 2017a).

Di masa silam, benteng ini merupakan simbol pertahanan terhadap bangsa asing. Ditambah di benteng ini terdapat banyak meriam yang dulunya digunakan untuk menghalau musuh. Sebagaimana lazimnya benteng yang dibuat untuk pertahanan,

benteng keraton Buton juga menjadi pusat pemerintahan, pusat penyebaran agama, serta pusat pemukiman. Apabila mengunjungi benteng ini, maka akan ditemukan perkampungan yang cukup luas di dalamnya. Perkampungan ini terdiri atas dua kelurahan yaitu Kelurahan Melai dan Kelurahan Baadia. Di tengah perkampungan tersebut terdapat Masjid Agung Wolio yang berdiri kokoh di tengah benteng dan menjadi pusat penyebaran Islam.

Menurut catatan sejarah, benteng ini mulai dirancang pada masa pemerintahan Sultan Buton III La Sangaji (1591-1597 M) dilanjutkan oleh Sultan Buton ke IV La Elangi yang bergelar Dayanu Ikhsanuddin (1597-1631 M) seterusnya oleh La Buke yang bergelar Gafur Wadudu (1632-1645 M). Di masa lalu, di dalam benteng inilah pusat seluruh aktivitas kesultanan di jalankan (Susanti, 2017b). Masa pendirian hingga lebih 50 tahun dengan melibatkan tenaga seluruh masyarakat Buton baik kaya atau miskin secara gotong royong. Pada saat pendirian benteng ini, tercatat nama seorang perempuan kaya bernama Wa Ode Wau yang mensponsori dana pendirian benteng yang dibuat dari batu dicampur dengan pasir dan kapur sebagai perekatnya. Nama Wa Ode Wau kemudian dipatri menjadi nama sebuah gedung pertemuan yang terletak tidak jauh dari pelabuhan (Darmawan, 2008, hal. 16).

### *Malige (Mahligai) Kesultanan Buton*

Gambar 5. Malige Kesultanan Buton



Malige ialah sebutan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan berdiri kokoh di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Ia terletak di Kelurahan Melai, Kecamatan Batoambari, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

La Ode Faridi selaku cicit dari Sultan Buton Muhammad Hamidi, yang mana ia tinggal bersama para keturunan Sultan ke-38. Ia menjelaskan rumah tersebut merupakan kediaman pribadi Sultan Buton terakhir yang diberi nama Istana Malige. Ia

juga menyatakan bahwa di sekitar istana Malige juga ada bangunan yang dikhususkan untuk para selir Sultan. Bangunan tersebut diberi nama Istana Kamali (Kumparan, 2019).

Istana Malige sebagaimana yang disebut Mahligai bermakna begitu berharganya istana tersebut. Rumah setinggi empat lantai tersebut dibangun tanpa menggunakan gambar ataupun konsep tertulis. Saat ini, istana maupun rumah adat Buton masih dapat dijumpai di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

Bila diamati lebih saksama, rumah adat Buton terdiri dari bagian kepala, badan dan kaki yang sarat dengan falsafah orang Buton “*Pobinci-binciki Kuli*” (Mahrudin, 2014, hal. 340). Masyarakat Buton memiliki tradisi memberi lubang rahasia pada kayu terbaiknya untuk diberi emas dan menandakan lubang rahasia tersebut sebagai lambang bahwa sebuah rumah memiliki hati. Menurut adat Buton, hati adalah laksana intan pada manusia (Wulan, 2018). Di atas rumah tersebut, terdapat ukiran nanas dan naga yang merupakan lambang kerajaan dan kesultanan Buton. Selain keunikan rumah ini yang berdiri tanpa pasak, ia juga rumah tahan gempa. Adapun makna dari lambang naga dan nanas tersebut ialah (Darmawan, 2008), *pertama*, Nanas mudah tumbuh dan hidup di mana saja. Hal tersebut melambangkan sifat ketahanan dan keuletan dalam kehidupan. *Kedua*, Pohonnya walaupun rendah tetapi terkesan gagah perkasa. Mengandung sifat kepemimpinan yang rendah hati tetapi berjiwa kesatria. *Ketiga*, Semua daunnya berpinggir gerigi (duri-duri) merupakan pedang dan perisai yang melambangkan system pertahanan dan keamanan yang tangguh. *Keempat*, Di atas buahnya terdapat mahkota atau payung melambangkan kebesaran dan kemuliaan. *Kelima*, Di sekeliling buah terdapat banyak tunas, melambangkan makna yang mudah berkembang biak. *Keenam*, Isi buah manis dan berair, melambangkan kehidupan yang makmur bagi seluruh rakyat. *Ketujuh*, Seluruh kulit buah penuh dengan bayangan mata dengan telinga, mengandung pengertian bahwa Negara memiliki banyak jalur informasi demi menjaga keutuhan dan kestabilan pemerintah.

Dari hasil analisis budayawan Moersidi, nanas memiliki tiga unsur utama yaitu mahkota, buah dan tunas. Ketiga unsur tersebut melambangkan tiga lapisan social masyarakat Buton yaitu *Kaomu* (bangsawan), *walaka* (kaum kebanyakan), serta *papara* (kaum pekerja) (Darmawan, 2008). Berikut adalah ilustrasi tiga lapisan social masyarakat Buton pada masa itu:

Daun mahkota menggambarkan payung Kesultanan Buton yang senantiasa mengayomi rakyatnya. Mahkota itu memiliki tiga lembar daun yang diartikan sebagai kesatuan antara Sultan, Sapati, dan Kanepulu – tiga jabatan penting dalam Kesultanan. Kemudian buah nanas memiliki 72 sisik yang diartikan sebagai 72 *kadie* atau 72 daerah otonom di bawah kesultanan. Sedangkan empat tunas atau kelopak buah, melambangkan landasan nilai masyarakat Buton yang menjadi hukum moraitas yaitu *sara patanguna* (empat prinsip hidup). Keempat prinsip itu adalah *pertama, Pomaemaeka* yang berarti saling takut sesama manusia. *Kedua, Popia-piara* yang berarti saling memelihara sesama manusia. *Ketiga, Poma-masiaka* yang berarti saling menyayangi sesama manusia. *Keempat, Poangka-angkata* yang berarti saling menghargai sesama manusia;

Apabila dilihat di atas rumah adat Buton, nanas selalu berpasangan dengan naga. Hewan ini merupakan hewan mistis yang sedemikian populer dan bisa ditemukan di berbagai sudut kota. Bahkan di Pantai Kamali – yang terletak di kota Bau-Bau, terdapat patung naga yang berwarna hijau besar, sebagaimana yang tampak di bawah ini.

Gambar 7. Patung Naga di Pantai Kamali



Kehadiran patung naga di pusat kota Bau-Bau disebut berbagai kalangan sebagai pengabdian symbol hubungan persahabatan dan perdagangan yang sudah terjalin sejak lama antara pihak kerajaan atau Kesultanan Buton dengan bangsa Cina.

Nama Dungku Changia dalam catatan sejarah Kerajaan Buton masa lalu disebut sebagai seorang laksamana asal Cina yang termasuk punya andil membangun hubungan persahabatan dan meluaskan perekonomian rakyat melalui kerjasama perdagangan di masa-masa kerajaan (Noesa, 2017).

### *Martabat Tujuh Sebagai Undang-Undang Kesultanan Buton.*

Kehadiran Islam di Buton tidak lepas dari perjalanan dakwah dan islamisasi di Nusantara (Tungkagi, 2017). Orang Buton yang menerima Islam sebagaimana kelompok masyarakat lainnya yang mendapat arus deras pengaruh Islam pada masa awal, tidak dapat melepaskan diri secara komprehensif dari tekanan dan daya Tarik *trend* budaya yang berkembang pada masa itu. Masyarakat Buton sesungguhnya merupakan bagian dari mikrokosmos penghayatan Islam di wilayah ini.

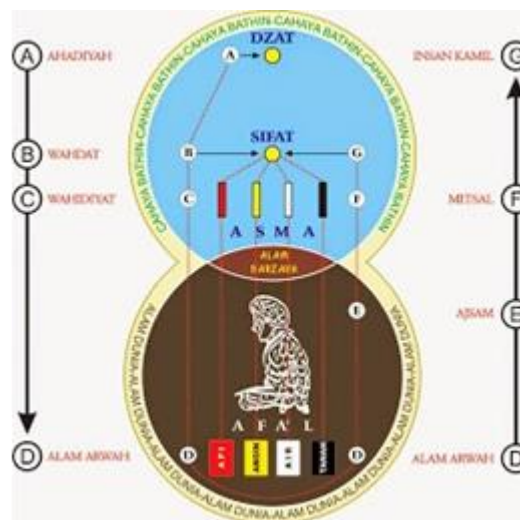
Persentuhan Islam di Buton tentu tidak lepas dari menyusupnya agama ini pada beberapa daerah tertentu. Sehingga kemudian Raja Buton yang ke-6, dikenal dengan Sultan Murhum membuka lembaran penting dalam sejarah Islam di wilayah ini. Penetapan Islam sebagai ideologi tunggal, khususnya di wilayah pusat kerajaan, sangat berpengaruh secara psikologis bagi seluruh masyarakat Buton dari tingkat yang teratas hingga tingkat masyarakat ke bawah, guna memilih jalan yang sama dengan raja mereka pada saat itu dilanjut pada masa berikutnya.

Penggunaan istilah sultan dan “*khilafah*” di bumi, raja-raja Buton setelah masa Raja Mulae berusaha mentransfer dan menerjemahkan nilai-nilai Islam dengan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Tugas dan tanggung jawab kepada Allah mulai diberi penekanan dan puncaknya adalah pada zaman La Elangi (Yunus, 2015) atau Sultan Dayyan Ihsan al-Din (1578-1616) yang membuat undang-undang kesultanan dengan nama *Martabat Tujuh*. Beberapa bagian dari muatan undang-undang tersebut tidak dapat disangkal mengenakan pada pentingnya bersikap dan berakhlak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw (Alifuddin, 2013, hal. 10). Misalnya pada pasal 3 disebutkan, bahwa sifat yang wajib atas pemimpin masyarakat terdiri atas empat perkara, yaitu *pertama*, *Siddiq*, benar dan jujur dalam segala hal serta rela berkorban demi kebenaran. *Kedua*, *Tabligh*, mampu menyampaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada raja. *Ketiga*, *Amanat*, mempunyai rasa kepercayaan terhadap rakyat dan sebaliknya dipercaya oleh rakyat. *Keempat*, *Fathanah*, pandai dan fasih berbicara (Alifuddin, 2006).

Keempat sifat di atas merupakan sikap utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membangun masyarakat. Hingga kini, keempat unsur di atas seharusnya menjadi pedoman penting ketika memilih pemimpin. Karena keempat unsur di atas merupakan tradisi etik sosial Islam yang diwariskan oleh Muhammad Saw.

Undang-undang Martabat Tujuh menjadi fondasi perubahan yang mendasar dalam struktur pemerintahan, hukum maupun adat istiadat masyarakat Buton. Sultan menjalankan tugasnya selalu menggunakan petunjuk dalam undang-undang. Kebijakannya selalu disertai dengan nafas keislaman, salah satunya ialah dalam memutuskan perkara dilakukan dengan musyawarah, dalam Islam kita mengenal *syura* (Apurines, Muradi, & Kartini, 2018, hal. 30).

Gambar 8. Tujuh lapisan alam dalam Martabat Tujuh



Berikut martabat tujuh versi Sultan Dayyan Ihsan al-Din di Buton, yang mana telah menjadi kompilasi kitab-kitab martabat tujuh yang disusun menjadi Undang-undang Kerajaan. Diantaranya sebagai berikut (Abdillah, 2010, hal. 103-104) *pertama*, Martabat *Ahadiyah* ialah zat Allah semata dan tidak di'itibarkan dengan sifat. Martabat ini disebut *la ta'ayyun* artinya belum nyata. Pada martabat ini akal tidak mampu menjangkaunya karena yang ada hanya zat Allah semata-mata sedangkan asma dan sifat belum ada. *Kedua*, Martabat *Wahdah* adalah sifat Allah. Martabat ini disebut *ta'ayyun awal* artinya kenyataan pertama. Pada martabat ini permulaan akal mengetahui sifat Allah, sifat *salbiyah* dan sifat *wujudiyah*. *Ketiga*, Martabat *Wahidiyah* adalah asma' Allah. Martabat ini disebut *ta'ayyun tsani* artinya kenyataan kedua. Pada martabat ini Allah dikenal oleh akal melalui *asma'-Nya*, sebab asma' menunjukkan zat.

*Keempat*, Martabat 'Alam Arwah, yaitu permulaan segala nyawa baik bagi manusia maupun makhluk lain. Nyawa yang pertama kali dijadikan adalah nyawa Nabi Muhammad Saw. Karena itu, ia bergelar *abu al-Arwah* artinya bapaknya segala nyawa. Setelah 127.000 tahun baru ruh yang lain diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan

sesudahnya karena ruh Muhammad. *Kelima*, Martabat ‘*Alam Mitsal*’ yaitu perumpamaan segala keadaan selain keadaan Tuhan. Segala sesuatu selain Tuhan ada perumpamaannya dalam alam *mitsal* ini. keadaan alam *mitsal* ini halus tidak dapat dicapai dengan panca indra. *Keenam*, Martabat ‘*Alam Ajsam*’ yaitu segala keadaan yang nyata, seperti tanah, batu, awan, air dan benda-benda lainnya yang dapat dibagi dan disusun. Alam ajsam disebut dengan alam syahadat artinya alam yang nyata dapat dirasakan dengan panca indra. Alam pertama yang dijadikan Allah adalah *arsy*, kursi, kalam, *lauh mahfidz*. Setelah itu, diciptakan tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit yang disebut wujud ada, sedangkan bumi disebut wujud *ummahat*. Ajsam yang ada di bawah langit ada tiga jenis, yaitu *hayawanat*, *jamadat*, *nabatat*. Dari semua ajsam tubuh Nabi Adam pertama kali diciptakan di atas bumi. Karena itu, ia bergelar Abu al-Basyar artinya bapak manusia. Badan manusia terbentuk dari empat anasir; tanah, air, angin, api. *Ketujuh*, Martabat ‘*Alam Insan*’ yaitu manusia. Alam ini disebut martabat martabat *jam’iyyat* artinya mengumpulkan segala dalil yang menunjukkan keadaan Tuhan yaitu sifat *jalal* dan *jamal*. Dalam diri manusia terdapat dua perumpamaan; roh sebagai perumpamaan *al-Haq* (Tuhan), badan sebagai perumpamaan *al-Khalq* (makhluk). Dalam diri manusia memiliki sifat dua puluh sebagaimana sifat wajib Allah. Badan manusia disebut alam kecil atau mikrokosmos, sedangkan alam semesta disebut alam besar atau makrokosmos. Bahkan manusia lebih sempurna karena dalam dirinya terdapat ruh yang tidak ada pada alam besar.

Adapun lahirnya hukum Martabat Tujuh di Buton dikarenakan beberapa faktor antara lain; *Pertama*, anggota masyarakat termasuk anak-anak *kaomu* bertindak di luar koridor hukum, sehingga menyebabkan kondisi keamanan negara tidak kondusif. *Kedua*, tidak adanya konstitusi tertulis (hukum positif) yang secara eksplisit menentukan otoritas administrasi negara yang dibutuhkan oleh negara yang berdaulat. *Ketiga*, rakyat Buton mengalami krisis ekonomi, yaitu bencana kelaparan yang disebabkan oleh kekeringan panjang di era Sultan ketiga, La Sangaji (Nalefo, 2017, hal. 8-9).

Menurut sumber setempat, Undang-Undang Martabat Tujuh dibuat oleh Sultan sendiri dibantu oleh seorang Ulama yang bernama Syarif Muhammad atau Firdaus Muhammad (Yunus, 2015). Ulama ini berada di Buton sebelum tahun 1035 H atau 1614 M. Hal ini diketahui karena sebuah sumber di Muna menyebutkan bahwa pada tahun

itu Ulama tersebut berada di Muna setelah tinggal di Walio-Buton, beberapa tahun lamanya. Sehingga bisa disimpulkan yang membawa ajaran *wujudiyah* ke Buton ialah Syarif Muhammad. Semenjak adanya hukum tersebut, kondisi masyarakat Buton lebih mudah dikontrol, keamanan negara kondusif tanpa adanya kesewenang-wenangan Pemerintah atau masyarakat serta ekonomi rakyat membaik.

Munculnya paham ini dalam dunia tasawuf adalah sebagai akibat adanya pengalaman *fana* dan *baqa'* yang terjadi bagi sufi dalam "pengembaraan" tasawufnya. Pemikiran tasawuf di Buton pada abad ke-19, rupanya mengikuti alur pemikiran ini. Hal ini diketahui melalui ajaran tasawuf Muhammad Firdaus. Ia menerima paham tasawuf *wujudiyah* karena terlebih dahulu mengakui terjadinya *fanadan baqa'* dalam pengembaraan tasawufnya. Karena menerima paham *wujudiyah*, Firdaus menerima pula konsep "martabat tujuh" yang menjadi bagian ajaran *wujudiyah* dalam tasawuf teosofis.

## Pembahasan

### *Analisis Kontekstualisasi Konsep "Martabat Tujuh" di Era Modern*

Mempelajari jejak-jejak sejarah, dalam hal ini Kesultanan Buton beserta peninggal-peninggalannya, merupakan jalan untuk mengenal lebih jauh sejarah nenek moyang terdahulu. Sebagaimana yang diketahui Keraton Buton merupakan sumber sejarah lokal yang menyimpan banyak peninggalan sejarah maupun nilai-nilai budaya lokal yang sangat berharga (Guntur, 2018, hal. 93) salah satunya konsep sufistik "Martabat Tujuh".

Setelah membaca proses konsep "martabat tujuh" bermula hingga kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Kesultanan Buton. Selanjutnya diaplikasikan oleh para Sultan, sebagai syarat wajib untuk menduduki kursi Kesultanan. Sultan pada masa itu, adalah seorang tokoh sufi yang sekaligus menjabar sebagai Raja atau "*khalifah*" bagi rakyatnya. Jika ditinjau dari sejarah, aplikasi martabat tujuh telah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad Saw. Beliau bukan hanya sebagai pemimpin Islam melainkan sebagai pemimpin umat.



Konsep “martabat tujuh” sebagaimana konsep sufistik membahas mengenai tujuh tingkatan gradasi wujud sebagaimana yang telah di urai di atas, merupakan hasil pengembangan konsep sufistik Ibn Arabi dan Al-Jili yang dilakukan Syekh Fadl Allah al-Burhanpuri (1020 H/1620 M) (Abdillah, 2010).

Ditinjau dari awal mula konsep “martabat tujuh” bermula ialah melalui proses *tajalli* (Kurniawan, 2013, hal. 285) Tuhan. Menurut Ibn Arabi dalam kitab *Fushus al-Hikmah* ada dua; pertama, *tajalli ghaibi (tajalli zati)*, kedua *tajalli syuhudi*. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Al-Jili dalam kitab *al-Insan Kamil* menjadi lima martabat *tajalli* yaitu *uluhiyyah, ahadiyyah, wahidiyyah, rahmaniyah, rububiyah*. Selanjutnya, al-Burhanpuri mengembangkan konsep tersebut menjadi tujuh martabat dalam kitab *Tuhfah al-Mursalat ila Ruh al-Nabiyyi* (Abdillah, 2010).

Menurut hemat penulis, proses untuk menjadi pemimpin ialah melewati konsep “martabat tujuh”. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kesultanan Buton yaitu mewajibkan untuk siapa yang akan menduduki Kesultanan harus memahami “martabat tujuh” atau ajaran tasawuf yang ada di dalamnya. Ini menjadikan kedudukan Sultan lebih dihormati sekaligus menjadi teladan bagi masyarakatnya.

Apabila ditinjau dengan perkembangan zaman saat ini, sebagaimana pemimpin yang akan menduduki jabatan, tidak menjadi prasyarat dalam memimpin yaitu memahami agama (Muda, 2014). Sebagaimana kita ketahui bahwa memilih pemimpin menempati posisi yang paling penting di dalam Islam. Sehingga pilihlah pemimpin yang mampu melakukan empat hal yaitu *Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah* (Zahroh, 2019). Menurut penulis, empat poin tersebut adalah dasar untuk menjadi seorang pemimpin.

Sesungguhnya konsep “martabat tujuh” merupakan cerminan untuk membangun kedaulatan rakyat yang aman dan sejahtera. Namun, di era modern ini pengaplikasian teladan para leluhur tidak begitu aktif. Sehingga banyak terjadi fitnah, caci, dan saling mengadu domba antara satu dengan yang lain. Apabila ditinjau dari konsep “insan kamil”, pada masa Kesultanan Buton. Keamanan dan kestabilan kerajaan menjadi ukuran kesempurnaan kekuasaan Sultan. Hal ini berarti, bila Negara dalam situasi labil, tidak terkendali, Sultan yang berkuasa dianggap tidak sempurna kekuasaan lahir dan batinnya. Hal ini berlaku sebaliknya.

Dengan demikian, konsep *insan kamil* atau manusia sempurna yang ada dalam tasawuf teosofis digunakan untuk memperkuat charisma Sultan. Karena dengan diyakininya sebagai "*insan kamil*", Sultan dalam hal ini Pemimpin diyakini pula sebagai manusia yang memiliki kekuasaan lahir dan batin yang dapat membawa berkah dan menciptakan kemakmuran di seluruh negeri.

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa konsep martabat tujuh di era modern telah terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin berubah-ubah. Sehingga di sini dibutuhkan empat konsep sifat Rasulullah Saw sebagai teladan utama, agar pemimpin bisa berlaku adil dan mensejahterakan rakyatnya. Keempat hal itulah yang akan membawa Negara pada kemakmuran dan kesejahteraan.

### **Simpulan**

Semboyan Kesultanan Buton tentang kehancuran hal-hal yang bersifat duniawi lebih baik daripada kehancuran spirit agama yang termanifestasi dalam diri seseorang, menjadi contoh dalam pengelolaan kehidupan manusia terutama pada pemerintahan Negara. Sebagaimana antara satu dengan yang lainnya saling mengorbankan dan agama adalah junjungan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Semakmur apapun negeri, namun tidak memiliki keselamatan agama niscaya yang ada hanyalah kehampaan dan perpecahan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan, tulisan ini merupakan alur kisah Kesultanan Buton beserta pemerintahannya. Diawali dari Islam diterima sebagai agama kerajaan Buton pada masa pemerintahan raja keenam yaitu Lakilaponto, pada tahun 948 H/1540 M. Setelah memeluk Islam Lakilaponto dilantik menjadi Sultan dengan gelar Qa'im ad-din (138-1584) yang lebih *masyhur* dengan panggilan Sultan Murhum. Dilanjutkan dengan jejak sejarah Kesultanan Buton diantaranya adalah; Masjid Tua Wawoangi, Masjid Agung Keraton, Benteng Keraton Buton, Malige (Mahligai) Kesultanan Buton dan *Martabat Tujuh* Sebagai Undang-Undang Kesultanan Buton yang hingga kini masih ada atau menjadi objek wisata.

Kesultanan Buton merupakan bagian dari proses islamisasi di Nusantara. Sebagaimana ajarannya yang melekat tentang "martabat tujuh" yaitu integrasi tasawuf Ibn Arabi. Tak dapat dipungkiri, ketika Islam masuk di Buton peradaban semakin maju dengan jejak sejarahnya yang monumental yaitu Benteng Keraton Buton/Wolio sebagai benteng terluas di dunia, dengan memiliki luas sekitar 23.375 hektar.

Ajaran tasawuf di Buton pada masa itu, menjadi pelajaran khusus bagi Para Sultan. Sebagaimana dijelaskan pada bab pembahasan. Kemudian ajaran tasawuf tersebut terapkan dalam konsep “martabat tujuh” sebagai Undang-undang Kesultanan zaman kepemimpinan La Elangi atau Sultan Dayyan Ihsan al-Din (1578-1616 M). Hasil analisis penulis, konsep “martabat tujuh” hendaknya bisa menjadi konsep pemahaman dalam memilih pemimpin di masa kini. Dalam rangka menciptakan kedaulatan yang makmur dan sejahtera.

### Referensi

- Abdillah, A. M. (2010). *Tasawuf Kontemporer Nusantara Integrasi Tasawuf Ibn 'Arabi dan Al-Ghazali*. Jakarta: PT. Ina Publikatama.
- Abdullah, T. (1991). *Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Prisma.
- Adilia, W. F., & Said, I. M. (2019). Ritual Posuo “ Pingitan ” pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7(2), 273–281. Diambil dari [journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/download/7952/4241](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/download/7952/4241)
- Alifuddin, M. (2006). *Islam Buton (Interaksi Islam dengan Budaya Lokal)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Apurines, M. I., Muradi, M., & Kartini, D. S. (2018). PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. <https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3164>
- Brenner, M. L. (2014). 5. Drummers of the Sultan of Buton: The Lasting Influence of the Dutch East India Company on Local Music Traditions. In *Recollecting Resonances*. [https://doi.org/10.1163/9789004258594\\_006](https://doi.org/10.1163/9789004258594_006)
- Darmawan, M. Y. (2008). *Orang Buton dan Imanjinasi Sejarah*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Guntur, A. (2018). Kraton Buton Sebagai Sumber Sejarah Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. <https://doi.org/10.21009/jps.071.06>
- Idham. (2012). Pesona Masigi Ogena (Masjid Agung) Keraton Wolio Kesultanan Buton. *Lektur Keagamaan Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI*, 10(1), 209–232.
- Ilyas, H. F. (2017). Sepenggal Warisan Tertulis di Negeri Buto. *PUSAKA*.

- <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i1.175>
- Kurniawan, A. F. (2013). Konsep Tajalli ‘Abd al-Lāh Ibn ‘Abd al-Qahhār al-Bantanī dan Posisinya dalam Diskursus Wujūdiyyah di Nusantara. *Ulumuna*.  
<https://doi.org/10.20414/ujs.v17i2.163>
- Mahrudin, M. (2014). Kontribusi Falsafah Pobinci-Binciki Kuli Masyarakat Islam Buton Bagi Dakwah Islam Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Dakwah*. <https://doi.org/10.14421/JD.2014.15206>
- Muda, L. (2014). Pembentukan dan Pengembangan Karakter dalam Kepemimpinan. *Al-Ulum*, 14(1), 109–126. Diambil dari  
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/231/191>
- Nalefo, L. (2017). The Role of Martabat Tujuh within the Society of the Sultanate Buton Wolio. *Asian Culture and History*. <https://doi.org/10.5539/ach.v10n1p6>
- Nanti, S., Sewang, A. M., & Muzakkir, M. (2018). Pendidikan Islam di Zawiya pada Masa Kesultanan Buton Abad Ke-19. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(3), 538–561.  
<https://doi.org/10.24252/jdi.v6i3.6550>
- Ni’am, S. (2016). Tasawu di Tengah Perubahan Sosial (Studi tentang Peran Tarekat dalam Dinamika Sosial-Politik di Indonesia). *Harmoni*, 15(2), 123–137. Diambil dari <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/35>
- Noesa, M. (2017). Antara Kepala dan Ekor Naga yang Berpisah 5 kilometer. *www.kompasiona.com*.
- Purwanto, M. R. (2017). Sistem Pemerintahan Islam dan Undang-undang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara, V(2).
- Rajab, M. (2015). Dakwah Islam pada Masa Pemerintahan Sultan Buton ke XXIX. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1), 49–72. Diambil dari [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/195/142](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/195/142)
- Sangidu. (2002). Konsep Martabat Tujuh dalam At-Tuchfatul Mursalah Karya Syaikh Muhammad Fadhillah Al-Burhanpuri. *Humaniora*, 14(1).
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Susanti, D. (2017a). Perubahan dan Ancaman Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 11(2), 46–63.  
<https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v11i2.175>
- Tungkagi, D. Q. (2017). Varian Islam Nusantara : Jawa, Minangkabau dan Gorontalo.

- Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(2), 273–294. Diambil dari <https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/524>
- Yulianto, R. (2014). Tasawuf Transformatif sebagai Solusi Problematika Manusia Modern dalam Perspektif Pemikiran Tasawuf Muhammad Zuhri. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(1), 56–87. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Yunus, A. . (2015). *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuatan di KEsultanan Buton Pada Abad ke 19*. Jakarta: Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS).
- Zahari. (1977). *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*. Jakarta: Depdikbud.
- Zahroh, A. (2019). Kepemimpinan Pesantren dan Perubahan Sosial. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 3–4. Diambil dari <http://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/tarbiyatuna/article/view/399/283>